

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran kegiatan pengendalian dalam keterlambatan pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oeba. Keterlambatan pengembalian dana PEM sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan reviu kinerja yang dilakukan oleh Bappeda, yang mengakibatkan kurangnya monitoring terhadap penerima manfaat. Selain itu, pembinaan sumber daya manusia yang tidak memadai, di mana pelatihan dan pendampingan bagi penerima dana tidak dilakukan secara rutin, menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan usaha.

Meskipun terdapat upaya dalam pengendalian fisik aset dan otorisasi transaksi, masih terdapat celah dalam pemisahan fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang. Kelemahan dalam pencatatan dan dokumentasi juga berkontribusi pada kesulitan dalam melacak penggunaan dana, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan. Tanpa adanya indikator kinerja yang jelas, evaluasi terhadap efektivitas program menjadi terhambat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi keterlambatan pengembalian dana PEM, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pengendalian

internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana PEM, seperti Bappeda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pemerintah kelurahan. Sinergi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi, mempercepat identifikasi masalah, dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu dalam mengatasi keterlambatan pengembalian dana. Penguatan sistem pelaporan yang transparan serta mekanisme sanksi yang efektif juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan penerima dana. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pengendalian dana PEM dapat berjalan lebih optimal dan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

2. Faktor - faktor penyebab keterlambatan pengembalian dana PEM di Kelurahan Oeba dipicu oleh berbagai faktor, antara lain kemacetan usaha, Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Dana PEM, Minimnya Pendampingan Kepada penerima dana PEM, Manajemen Keuangan yang Buruk, dan Sanksi yang kurang tegas. Faktor-faktor ini secara bersamaan menghalangi penerima dana untuk melakukan pembayaran kembali dana PEM sesuai jadwal hal ini membahayakan keberlanjutan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Oeba.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pemerintah Kota Kupang perlu merumuskan regulasi yang lebih tegas terkait sanksi bagi penerima dana Program Embedded Management (PEM) yang melakukan penunggakan atau penyalahgunaan dana. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme sanksi administratif seperti penghentian sementara pencairan dana, kewajiban pengembalian dana, serta pemberian denda, bahkan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran berat. Selain itu, transparansi informasi mengenai kepatuhan penerima dana perlu diutamakan sebagai upaya pencegahan.
2. Bagi Bappeda Kota Kupang perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PEM di tingkat kelurahan, termasuk menetapkan indikator kinerja yang jelas serta mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis digital. Selain itu, dinas harus menyediakan dukungan sumber daya dan pelatihan secara berkelanjutan kepada LPM agar pengelolaan dana dan pendampingan penerima dana lebih profesional dan efektif.
3. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) LPM harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin, khususnya dalam manajemen keuangan, pencatatan, dan pengelolaan usaha penerima dana agar pengelolaan dana lebih profesional dan efektif. Selain

itu, LPM perlu memperkuat mekanisme pengendalian internal dengan memperjelas pemisahan fungsi, memperketat proses otorisasi transaksi, serta menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten untuk meningkatkan kepatuhan penerima dana dalam pengembalian dana PEM.

4. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun objek penelitian, agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dan pengendalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)